



**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2025**



Disusun oleh :

Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025

Alamat Sekretariat Tim : Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota, Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001

E-mail : perencanaanbapendainhil@gmail.com

(Sub.Koordinator Sub Stansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Bapenda Kab. Inhil)

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai penunjang pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan 2 (dua) program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan rencana dukungan dana APBD T.A. 2025 sebesar Rp **16.427.584.992,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Tembilahan, Juli 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRA GIRI HILIR,**



FADILAH, S.Pi, MT

Perencana Utama Muda

Nip. 1991103 199803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.Sistimatika.....	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	24
2.4 Rivew Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	37
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023	11
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	21
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.	29
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	35
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ..	37
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dari perencanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Renja OPD harus tercantum dalam Renstra OPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimulai dengan usulan Sub Kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubbag/Kasubbid pada Sekretariat, Bidang Pajak Daerah 1, Bidang Pajak Daerah 2, Bidang Pengendalian Pajak Daerah dan Bidang Perencanaan Pengembangan, Hukum dan Kerjasama dan Pembukuan Pendapatan Daerah tahun 2025.

Kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Indragiri Hilir melalui Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja OPD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD. Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagaimana lampiran I Surat Edaran Bupati Indragiri Hilir Nomor 005 Tahun 2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Pedoman penyusunan Rancangan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025, untuk rancangan awal Renja Perangkat daerah mencakup analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

5. UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Pengganti UU Nomor 28 Tahun 2009) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
17. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun tujuan dibuatnya Renja-PD Badan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir agar terarah dan sesuai dengan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;
2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian dokumen Renja-PD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai dasar penentuan

KUA dan PPAS, RKA tahun 2025 oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4. Sistematika Renja-PD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja-PD, serta proses penyusunan Renja-PD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOPD, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja-PD.

1.4. Sistematika Renja-PD

Mengemukakan sistematika Renja-PD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD Badan Pendapatan daerah tahun lalu (tahun n-2/2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1/2026), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja-PD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu, dan realisasi Renstra-PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra-PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah Tabel 2.1, 2.2, 2.3

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta normal dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, Tabel 2.4.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSKP, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

Adapun Tabel yang akan disajikan sebagaimana format tabel 2.5.

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbag ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Sajikan Tabel 2.6

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran terget kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tabel 3.1.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- Pencapaian SDGs,
- Pengentasan kemiskinan,
- Pencapaian NSKP dan SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
- Pengembangan daerah terisolir,
- Dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan.

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel Rumusan Rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel yang disajikan : Tabel 4.1

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah tahun 2022, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2023
Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	100	92,00	93	96	100	100	100	33
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	23,88	22	21,60	98	13	13	33
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	12	2	2	2	100	4	4	33
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	7	5	5	100	5	5	33
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	100	100	98,50	98,50	100	100	33
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	68	63	71	63	88,73	63	63	33
5 02 01 2.02 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	54	-	18	18	100	18	18	33
5 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	90	100	50	50	100	100	-
5 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	197	45	63	-	-	63	63	33

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang/Bulan	38	2	10	10	100	11	11	29
5 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	100	100	94,80	94,80	100	100	32
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	3	1	1	1	100	1	1	33
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	26	11	14	14	100	9	9	35
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	6	2	4	4	100	2	2	33
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	9	3	3	3	100	3	3	33
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	26	6	6	6	100	6	6	33
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	920	316	297	296	99,66	305	305	33
5 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	100	93	93	100	100	100	33
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	10	3	2	2	100	3	3	30
5 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	100	93	93	100	100	100	33
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	3	1	1	1	100	1	1	33
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	12	100	12	12	33
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	3	1	1	1	100	1	1	33

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	100	100	93	93	100	100	100	100
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	124	38	40	40	100	40	40	32
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	142	45	50	50	100	45	45	32
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	6	3	1	1	100	2	2	33
5 02 01 2.09 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	6	3	3	3	100	2	2	33
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah/ Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah	Persen	10	9,16	10,02	9,61	91,42	2	2	33
5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Persen	10	9,16	10,02	9,61	91,42	8	-	-
		Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen						100	100	33
		Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak	Persen						100	100	33
		Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment	Persen						2	2	2
		Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	Persen						2	2	2
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan pajak Daerah	Dokumen	3	-	1	1	100	1	2	67

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta Terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	3	12	1	1	100	1	14	33
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	6	2	1	1	100	1	4	33
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	3	1	1	1	100	1	3	33
5 02 04 2.01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	33
5 02 04 2.01 06	Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Basis Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	3	-	1	1	-	1	2	33
5 02 04 2.01 07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	33.100	6.184	10.000	14.218	136	10.100	30.502	33
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Dokumen	488.000	142.115	160.000	170.711	107	161.500	474.326	33
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	9.600	3.000	3.000	3.000	100	3.100	9.100	33
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	38	13	12	12	100	12	37	33
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	111.250	35.400	36.175	57.854	160	36.650	129.904	33
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	4.780	6.000	1.300	1.893	146	1.450	9.343	33
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	850	195	230	328	143	260	783	33
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	6	2	2	2	100	2	6	33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (renja-PD tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11(6+8+10)	12 (11/5)
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	3	-	2	2	100	1	3	33

Pelaksanaan anggaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2023 sebagian besar terlaksana sesuai yang diharapkan, dengan capaian total secara umum capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program dan kegiatan yakni realisasi Fisik 93.27 % dan realisasi anggaran sebesar 80.54%. Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 2 Program dan 8 kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Beberapa sub kegiatan yang target kinerja tidak tercapai antara lain :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD Tahun (2023)	Uraian
2	3	4	5	6	7
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Persen	10,02	9,61	Tidak sesuai target
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	Persen	10,02	9,61	Tidak sesuai target
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai	22	21,60	Tidak sesuai target
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100	98,5	Tidak sesuai target
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	71	63	Tidak sesuai target
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	100	50	Tidak sesuai target
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	63	-	Tidak sesuai target
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100	94,8	Tidak sesuai target
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	297	296	Tidak sesuai target

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Satuan	2023		Uraian
			Target	Realisasi	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Sesuai target
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18 Laporan	18 Laporan	Sesuai target
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang	10 Orang	10 orang	Sesuai target

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Satuan	2023		Uraian
	Pelatihan				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	Sesuai target
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14 Paket	14 Paket	Sesuai target
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4 Paket	Sesuai target
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3 Paket	3 Paket	Sesuai target
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	Sesuai target
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	93 Persen	93 %	Sesuai target
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2 Unit	Sesuai target
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	93 Persen	93 Persen	Sesuai target
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai target
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Sesuai target
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	93 Persen	93 %	Sesuai target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40 Unit	40 Unit	Sesuai target
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50 Unit	50 Unit	Sesuai target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1 Unit	Sesuai target
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3 Unit	Sesuai target
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai target
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai target
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai target
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	1 Unit	1 Unit	Sesuai target
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	Sesuai target
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	Sesuai target
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3.000 Layanan	3.000 Layanan	Sesuai target
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	Sesuai target
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Sesuai target
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Sesuai target

3.1 Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Satuan	2023		Uraian
			Target	Realisasi	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	93 Persen	96.08	Realisasi melebihi target
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	10.000 Obyek Pajak	14.218 Obyek Pajak	Realisasi melebihi target
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	160.000 Dokumen	170.711 Dokumen	Realisasi melebihi target
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	36.175 Dokumen	57.854 Dokumen	Realisasi melebihi target
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	1.300 Dokumen	1.893 Dokumen	Realisasi melebihi target
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	230 Dokumen	328 Dokumen	Realisasi melebihi target

3.2 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan;

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor-faktor Penyebab
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Faktor penyebab belum tercapainya target Perjanjian Kinerja sekitar 0,41 % antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Data objek pajak selalu mengalami perubahan baik status kepemilikan, ukuran, maupun bangunan di atasnya. Namun perubahan ini seringkali tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bapenda. Jika informasi ini sampai ke petugas pajak maka secara cepat petugas akan datang untuk melakukan pendataan ulang atas data objek pajak tersebut. Namun dengan kondisi geografis dan cakupan yang luas, maka seringkali data tersebut luput dari pantauan petugas, sehingga data tidak dirubah dan pajak tidak dibayarkan atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai. • Masih besarnya jumlah tunggakan Piutang Pajak Daerah yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak • Potensi Pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum dikelola secara maksimal
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - IKU telah selaras dengan tujuan dan sasaran, namun terjadi beberapa perubahan terhadap tujuan dan sasaran dari IKU dalam 5 tahun periode Renstra - Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja belum dilaksanakan secara terdokumentasi, Laporan pengendalian Renstra belum dibuat dan Perubahan atas APBD tahun 2023 tidak ada - Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan dalam mewujudkan kondisi/hasil yang baik belum dapat diukur, laporan pengendalian Renstra belum dibuat dan Perubahan atas APBD tahun 2023 tidak ada
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hal ini disebabkan adanya realisasi Sub kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan ini tidak dapat terealisasi 100 %
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hal ini disebabkan penganggaran 71 orang untuk mengantisipasi ketersediaan gaji dan tunjangan beberapa jabatan UPT yang kosong, namun dengan adanya beberapa SN yang pensiun, mutasi ASN yang tersedia hanya 63 orang
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hal ini disebabkan adanya realisasi Sub kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan ini tidak dapat terealisasi 100 %
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Sub kegiatan ini tidak terlaksana disebabkan adanya Rencana Rasionalisasi anggaran yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hal ini disebabkan adanya realisasi Sub kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan ini tidak dapat terealisasi 100 %
Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terdapat 1 kali Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta yang tidak dapat diikuti disebabkan waktu yang berbenturan dan tidak memungkinkan untuk diikuti

3.3. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan; Realisasi sesuai target disebabkan antara lain :

- Penetapan target kinerja yang realistis sesuai dengan kondisi ril di lapangan
- Adanya kesungguhan dari tim kerja di lingkungan Bapenda yang didukung oleh pihak terkait
- Penyusunan jadwal kerja yang baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana.
- Adanya dukungan dari pimpinan yang memberikan motivasi dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah

4. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan;

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Faktor-faktor Penyebab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Realisasi melebihi target disebabkan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan target yang realistis ▪ Penyusunan jadwal yang baik dan pelaksanaan yang tepat waktu ▪ Dukungan dan motivasi yang diberikan oleh pimpinan ▪ Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. ▪ Adanya kesungguhan petugas dalam memberikan penyuluhan/ pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya kewajiban untuk membayar pajak.
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
Penetapan Wajib Pajak Daerah	
Penagihan Pajak Daerah	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

- Kontribusi Pajak dari terhadap Pendapatan Asli Daerah masih kurang optimal.
- Tingginya angka piutang pajak yang terus terakumulasi

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

- Melakukan pendataan, validasi dan verifikasi untuk memperbaiki data wajib pajak daerah secara menyeluruh
- Melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan optimalisasi pendapatan dari pajak daerah

- Meningkatkan kemampuan aparatur pajak daerah melalui pelatihan di bidang perpajakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pengukuran kinerja kegiatan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, ditetapkan berdasarkan target Renstra tahun 2023 yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator sasaran adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 10.02 %.

Berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2023 didapat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.015.992.762.090,- sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp.193.689.396.296,-. Maka Realisasi Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebesar 9,61 %.

Realisasi ini belum sesuai dengan target tahun 2023 sebesar 10,02 %, atau selisih kurang sebesar 0,41 %. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target tahun 2023 antara lain :

- Data objek pajak selalu mengalami perubahan baik status kepemilikan, ukuran, maupun bangunan di atasnya. Namun perubahan ini seringkali tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada Bapenda. Jika informasi ini sampai ke petugas pajak maka secara cepat petugas akan datang untuk melakukan pendataan ulang atas data objek pajak tersebut. Namun dengan kondisi geografis dan cakupan yang luas, maka seringkali data tersebut luput dari pantauan petugas, sehingga data tidak dirubah dan pajak tidak dibayarkan atau pajak yang dibayarkan tidak sesuai.
- Masih besarnya jumlah tunggakan Piutang Pajak Daerah yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak
- Potensi Pendapatan dari Retribusi Daerah yang belum dikelola secara maksimal

Pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun* 2024	Tahun* 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)		(8)		
I	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERPENUHI	Persen	-	-	92	93	100	100	92	96,00	100	100	Diatas target
1	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Persen	-	-	22	22	24	14	-	21,60	14	14	Dibawah target
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	-	-	2	2	2	4	2	2	4	4	sesuai target
1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	5	5	5	5	7	5	5	5	sesuai target
2	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	-	-	92	93	100	100	100	99,00	100	100	Diatas target
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	-	-	90	74	63	65	63	63	63	65	Dibawah target
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	-	-	-	18	18	18	18	18	18	18	sesuai target
3	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen	-	-	92	100	100	100	90	50	100	100	Dibawah target
3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Paket	-	-	45	74	63	65	45	-	63	65	Dibawah target
3.2	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	2	5	13	14	2	10	11	14	diatas target
4	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	-	-	92	93	100	100	100	95	100	100	diatas target
4.1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	sesuai target
4.2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	-	-	6	6	9	9	11	14	9	9	diatas target
4.3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	-	-	2	2	2	2	2	4	2	2	diatas target
4.4	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	sesuai target
4.5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	-	6	6	6	8	6	6	6	8	sesuai target
4.6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	-	-	304	305	305	315	316	296	305	315	Dibawah target

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun* 2024	Tahun* 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)
5	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	-	-	100	100	100	100	100	93	100	100	Dibawah target
5.1	Jumlah Unit Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	-	-	2	2	2	3	3	2	-	3	sesuai target
6	Cakupan Ketersediaan administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran	Persen	-	-	92	93	100	100	100	93	100	100	sesuai target
6.1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	sesuai target
6.2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan	Laporan	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	sesuai target
6.3	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	sesuai target
7	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Persen	-	-	92	93	100	100	100	93	100	100	sesuai target
7.1	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	-	-	38	40	40	43	38	40	40	43	sesuai target
7.2	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	-	-	45	50	50	47	45	50	45	47	sesuai target
7.3	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	2	2	1	1	3	1	2	1	sesuai target
7.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	-	-	3	3	2	2	3	3	2	2	sesuai target
II	Persentase PAD terhdap Pendapatan Daerah/Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	-	-	9,5	10,02	2,0	3,0	9,16	9,61	2,0	3,0	Dibawah target
	Persentase PAD terhdap Pendapatan Daerah	Persen	-	-	9,5	10,02	-	-	-	9,61	-	-	Dibawah target
	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Official Assesmen	Persen	-	-	-	-	2	3	-	-	2,0	3	-
	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Self Assesment	Persen	-	-	-	-	2	3	-	-	2,0	3	-
	Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak	Persen	-	-	-	-	100	100	-	-	100,0	100	-
	Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	-	-	-	-	100	100	-	-	100,0	100	-
1.1	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	sesuai target
1.2	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta terlaksananya pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	Dokumen	-	-	1	1	1	1	12	1	1	1	sesuai target

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun* 2024	Tahun* 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				(7)				(8)
1.3	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	-	-	2	1	1	2	2	1	1	2	sesuai target
1.4	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	sesuai target
1.5	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Laporan	-	-	12	12	12	12	12	12	12	12	sesuai target
1.6	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Laporan	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	sesuai target
1.7	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	-	-	5.000	10.000	10.100	11.000	6.184	14.281	10.100	11.000	diatas target
1.8	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	Dokumen	-	-	145.000	160.000	161.500	163.000	142.115	170.711	161.500	163.000	diatas target
1.9	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	-	-	3.000	3.000	3.100	3.200	3.070	3.000	3.100	3.200	sesuai target
1.10	Jumlah datapelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	-	-	12	12	12	12	13	12	12	12	sesuai target
1.11	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	-	-	35.400	36.175	36.550	37.100	35.400	57.854	36.650	37.100	diatas target
1.12	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Dokumen	-	-	1.150	1.300	1.450	1.600	6.000	1.893	1.450	1.600	diatas target
1.13	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokumen	-	-	215	230	260	285	195	194	260	285	diatas target
1.14	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Laporan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	sesuai target
1.15	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi tunai ke non tunai	Laporan	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	Dibawah target

Dari tabel dapat dilihat bahwa, sebagian besar Sarsaran Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2023 dapat dicapai sesuai dengan target. Dengan rincian Sbb :

Indikator Program :

- Terdapat 2 dari 2 Indikator Program dibawah target = 100 % (Capaian sedikit dibawah target)

Indikator Kegiatan :

- Terdapat 2 Kegiatan dari 8 Kegiatan yang Melebihi dari target = 25 %
- Terdapat 3 dari 8 Kegiatan yang melebihi target = 37,50 %
- Terdapat 3 dari 8 Kegiatan yang dibawah target = 37,50 %

Indikator Sub Kegiatan :

- Terdapat 23 dari 35 Sub Kegiatan sesuai target = 66 %
- Terdapat 7 dari 35 Sub Kegiatan yang melebihi target = 20 %
- Terdapat 5 dari 35 Sub Kegiatan yang Dibawah Target = 14 %

Tingkat capaian kinerja ini terkait erat dengan dukungan terhadap pencapaian Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu ***Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah***. program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah mendukung pencapaian Tujuan ke-3 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*** Dan Sasaran 3.2. yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Daerah*** Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka peranan Badan Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang taat pajak dan retribusi daerah. Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara dinamis terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta berkoordinasi dalam memperjuangkan optimalisasi penerimaan dan pendapatan daerah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah dalam bidang Keuangan Daerah yaitu

Pengelolaan Pendapatan dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan Tugas dan fungsi badan Pendapatan Daerah berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah relatif berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dimana Daerah hanya diberi wewenang terhadap 11 jenis pajak daerah antara lain : PBB-P2, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, pajak Penerangan Jalan, Pajak reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Minerba, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak parkir.

Hal-hal kritis yang menjadi isu penting dalam pelaksanaan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah adalah masih tingginya tunggakan Piutang Pajak Daerah dimana sampai tahun 2022. Angka tunggakan piutang pajak daerah mencapai 124 Milyar Rupiah.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya adalah :

1. Masih rendahnya akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil
2. Pendapatan Asli daerah dari sektor Pajak daerah masih belum optimal
3. Potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum terdata dan tergali secara optimal
4. Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu.
5. Informasi tentang Kebijakan Pajak Daerah belum tersebar luas dengan baik

Dampak yang akan dirasakan terhadap pencapaian tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Dari

Sektor Pajak Daerah, yang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Terkait ***Sustainable Development Goals (SDGs)*** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ikut mensukseskan salah satu agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pembayaran pajak dapat dilakukan secara online, melalui program ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas dalam transaksi pajak daerah.

Tantangan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan di Bidang Pajak Daerah adalah : masih rendahnya kesadaran wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu.

Masih banyak peluang di bidang perpajakan yang belum tergali dengan baik oleh Daerah seperti seperti Pajak PBB-P2 , dimana potensi pajaknya cukup tinggi, akan tetapi belum terdata dengan baik sehingga potensi pajak PBB-P2 belum tergali secara maksimal.

Hal-hal strategis yang perlu dilakukan dalam menghadapi tantangan dan peluang terhadap pelayanan di bidang Pajak Daerah antara lain adalah :

- Melakukan inventarisasi data secara menyeluruh terhadap potensi Pajak Daerah terutama PBB-P2
- Melakukan sosialisasi secara berkala dan terus menerus kepada wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu
- Memberikan penghargaan(*Reward*) bagi wajib pajak yang rajin melunasi kewajiban pajaknya serara rutin dan memberikan sanksi/hukuman bagi wajib pajak yang secara terus menerus tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi, permasalahan dan hambatan tersebut tersebut antara lain :

1. Rendahnya kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangya;
2. Masih banyaknya data Wajib Pajak yang tidak sesuai kepemilikan dengan yang sebenarnya, baik pada objek pajak maupun subjek pajak;

3. Realisasi target kurang maksimal dan masih besarnya tunggakan pajak daerah;
4. Potensi pajak daerah banyak belum tergali dan terdata secara maksimal;
5. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah;
6. Belum optimalnya budaya kerja aparatur dalam pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah

2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan ranwal renja berpedoman pada renstra perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam ranwal renja PD dengan renstra PD.

Forum PD/lintas PD merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan renja PD, dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan Bappeda. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja PD.

Hasil pembahasan rancangan renja PD dalam forum PD/lintas PD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.

Penyusunan ranwal renja juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil renja tahun berjalan. Hal ini untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam ranwal renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran renstra. Penyusunan ranwal renja PD mencakup analisis gambaran pelayanan PD dan hasil evaluasi renja tahun lalu.

Hasil perumusan ranwal renja disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat pendahuluan, hasil evaluasi renja PD tahun lalu, tujuan dan sasaran PD, renja dan pendanaan PD dan penutup.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat Wajib Pajak Daerah, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
1	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	13.713.627.857	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Indragiri Hilir	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	13.713.627.857	
2	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Indragiri Hilir	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	14 Nilai	54.316.996	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Indragiri Hilir	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	14 Nilai	54.316.996	
3	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	24.912.887	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	24.912.887	
4	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29.404.109	1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	29.404.109	
5	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	8.697.859.577	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 persen	8.697.859.577	
6	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	8.681.059.577	1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan	8.681.059.577	
7	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	16.800.000	1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18 Laporan	16.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
	SKPD		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			SKPD		Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
8	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen	115.500.864	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100 persen	115.500.864	
9	1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	65.320.864	1.3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62 Paket	65.320.864	
10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.180.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50.180.000	
11	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.839.380.044	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	2.839.380.044	
12	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.490.500	1.4.1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.490.500	
13	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	377.952.844	1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	377.952.844	
14	1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	168.772.500	1.4.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	168.772.500	
15	1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	298.391.200	1.4.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	298.391.200	
16	1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5.000.000	1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	5.000.000	

No	Rancangan Awal RKP					Rancangan akhir RKP					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
	undangan					undangan					
17	1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	534 Laporan	1.958.773.000	1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	534 Laporan	1.958.773.000	
18	1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	88.468.000	1.5.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	88.468.000	
19	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.534.470.376	1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	1.534.470.376	
20	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.400.000	1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.400.000	
21	1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	491.239.000	1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	491.239.000	
22	1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.035.831.376	1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.035.831.376	
23	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 persen	472.100.000	1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	100 persen	472.100.000	
24	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	101.000.000	1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	101.000.000	
25	1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan	Kab. Indragiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit	65.300.000	1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan	Kab. Indragiri	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	47 Unit	65.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
	Mesin Lainnya	Hilir	Dipelihara			Mesin Lainnya	Hilir	Dipelihara			
26	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	122.800.000	1.7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	122.800.000	
27	1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	183.000.000	1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	183.000.000	
28	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	3%	2.713.957.135	2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	3%	2.713.957.135	
29	2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	- Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah - Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	100 Persen 100 Persen 3 Persen 3 Persen	2.713.957.135	2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. Indragiri Hilir	- Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah - Tingkat Pemenuhan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Terhadap Penyelesaian Piutang Pajak - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah jenis Official Assesment - Tingkat Pertumbuhan pajak Daerah Jenis Self Assesment	100 Persen 100 Persen 3 Persen 3 Persen	2.713.957.135	
30	2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	25.560.000	2.1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	25.560.000	
31	2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	114.450.000	2.1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	114.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan akhir RKPD					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
	Daerah					Daerah					
32	2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	195.463.000	2.1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	195.463.000	
33	2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	172.453.000	2.1.4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	172.453.000	
34	2.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	225.614.000	2.1.5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	225.614.000	
35	2.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	21.000.000	2.1.6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	21.000.000	
36	2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12000 Obyek Pajak	320.458.795	2.1.7 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	12000 Obyek Pajak	320.458.795	
37	2.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	163000 Dokumen	485.242.000	2.1.8 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	163000 Dokumen	485.242.000	
38	2.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3200 Layanan	335.682.000	2.1.9 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3200 Layanan	335.682.000	
39	2.1.10 Penelitian dan	Kab.	Jumlah Data Pelaporan	12	47.288.000	2.1.10 Penelitian dan	Kab.	Jumlah Data Pelaporan	12	47.288.000	

No	Rancangan Awal RKP					Rancangan akhir RKP					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	6	12
	Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Indragiri Hilir	Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Indragiri Hilir	Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		
40	2.1.11 Penagihan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	37100 Dokumen	425.110.000	2.1.11 Penagihan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	37100 Dokumen	425.110.000	
41	2.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1600 Dokumen	111.075.000	2.1.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1600 Dokumen	111.075.000	
42	2.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	285 Dokumen	165.045.100	2.1.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	285 Dokumen	165.045.100	
43	2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	47.288.000	2.1.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	47.288.000	
44	2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	22.228.240	2.1.15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	22.228.240	
J U M L A H					16.427.584.992						16.427.584.992

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD lainnya.

Rancangan rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan. Adapun usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tahun 2025
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Prangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimana Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah

Dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan di bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah, Bapenda memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke-3 dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)**, pada sasaran ke-2 yaitu **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pencapaian Program Prioritas Nasional tahun 2025 yaitu dalam **rangka Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan**, serta mendukung Pencapaian **Prioritas Daerah Propinsi Riau yaitu Peningkatan Tata Kelola Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Yaitu Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator tujuan Bapenda yaitu Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah. Dengan rincian sbb :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	9
1.1	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	22
		Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen	3

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2025 merupakan implementasi rencana tahun ke-2 dari RPD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024-2026, untuk Mendukung pencapaian dari Tujuan ke-3 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), pada sasaran ke-2 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah.
- Program ini juga mendukung terwujudnya **Sustainable Development Goals (SDGs)** yaitu dengan menyediakan teknologi informasi pembayaran pajak daerah melalui sistim online. Pembayaran pajak secara online ini dapat mengurangi penggunaan kertas, sehingga turut berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan hidup.
- Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Pendapatan Tahun 2025 juga untuk mewujudkan tujuan Bapenda yaitu Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target tahun 2025 sebesar 22 %. Terwujudnya Kemandirian Keuangan Daerah merupakan sebuah cerminan bagi dalam menurunkan angka kemiskinan di Daerah.
- Badan Pendapatan Daerah merupakan OPD yang mengemban tugas urusan keuangan. Urusan keuangan diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Urusan Keuangan di Daerah tidak termasuk dalam urusan Wajib, namun menjadi penunjang pencapaian urusan wajib di Daerah baik pencapaian NSPK maupun SPM di Daerah

- Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 mencakup 2 dua Program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.
- Program pertama adalah program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini lebih banyak terpusat di Kantor Bapenda Indragiri Hilir Kecamatan di Kecamatan Tembilahan. Sedangkan Program kedua adalah Pengelolaan Pendapatan Daerah. Program ini sasarannya tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Indragiri Hilir. Masyarakat yang menjadi fokus sasaran adalah masyarakat wajib pajak yang memiliki objek pajak dari 11 Jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.
- Pada Rencana Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2025, Dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan 2 dua Program, 7 (Tujuh) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan adalah sebesar RP. 16.427.584.992,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 13.713.627.857, dan program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.713.957.135,-
- Pada Rancangan Kerja (Renja) Bapenda Tahun 2025, terdapat kesamaan Program antara Renja dan Renstra, Namun Terdapat 1 (satu) Kegiatan) dan 1 (satu) Sub kegiatan pada Renstra yang tidak dapat masuk pada Renja Tahun 2025 yaitu Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan. Hal ini disebabkan adanya surat edaran Pj. Bupati Indragiri Hilir No. 336 tahun 2024 tanggal 18 Juni 2024, tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang menyebutkan agar OPD tidak mengganggu pengadaan kendaraan dinas pada tahun 2025.
- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel Tabel 4.1.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang berisi program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif pendanaan, RKPD Tahun 2025.

Mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Indragiri Hilir sangat terbatas dalam penganggaran rencana program pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan kebijakan penganggaran program dan kegiatan prioritas agar skala dan kebutuhan yang paling diinginkan terakomodir.

Rumusan rencana program dan kegiatan dan Sub Kegiatan OPD Kabupaten Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 secara detail dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	BADAN PENDAPATAN DAERAH					16.427.584.992,00				16.968.524.760,00			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					16.427.584.992,00				16.968.524.760,00			
5	02	KEUANGAN					16.427.584.992,00			16.968.524.760,00			
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen		100 %	13.713.627.857,00		100 %	13.556.464.760,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata nilai aspek perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	Nilai		14 Nilai	54.316.996,00		15 Nilai	223.339.280,00
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	24.912.887,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	178.883.120,00
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	29.404.109,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		5 Laporan	44.456.160,00
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	8.697.859.577,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100persen	8.847.617.359,00
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	63 Orang/bulan	8.681.059.577,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		67 Orang/bulan	8.771.867.359,00
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	16.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Laporan	75.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		SKPD												
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik	Persen		100 persen	115.500.864,00			100persen	274.696.000,00
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62 Paket	65.320.864,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		67 Paket	63.000.000,00
5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Orang	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	50.180.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		15 Orang	211.696.000,00
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 persen	2.839.380.044,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100persen	1.966.492.981,00
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	30.490.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	37.046.800,00
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	377.952.844,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		11 Paket	489.850.000,00
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	168.772.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	186.624.581,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	298.391.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	312.251.600,00
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	15.720.000,00
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	534 Laporan	1.958.773.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		320 Laporan	925.000.000,00
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		100 persen	1.534.470.376,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100persen	1.710.283.940,00
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	7.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	7.938.600,00
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	491.239.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	629.795.600,00
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.035.831.376,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.072.549.740,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	Persen		100 persen	472.100.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		100persen	534.035.200,00
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43 Unit	101.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		43 Unit	164.064.400,00
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Unit	65.300.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 Unit	78.000.000,00
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	122.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	202.000.000,00
5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	183.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	89.970.800,00
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Persen		3 %	2.713.957.135,00			3 %	3.412.060.000,00
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Self Assesment 2. Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Cakupan Penunjang Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah 4. Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Jenis Official Assesment	persen persen Persen Persen		3 persen 100 persen 100 Persen 3 Persen	2.713.957.135,00			3 persen 100 persen 100 Persen 3 Persen	3.412.060.000,00
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.560.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	23.500.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	114.450.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	125.000.000,00	
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	195.463.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	200.000.000,00	
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah									
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	172.453.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	175.000.000,00	
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah									
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	225.614.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	175.000.000,00	
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah									
					Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	21.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	36.000.000,00	
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)									
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12000 Obyek Pajak	320.458.795,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12000 Obyek Pajak	510.000.000,00	
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah									
					Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	163000 Dokumen	485.242.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		164000 Dokumen	565.000.000,00	
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3200 Layanan	335.682.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3300 Layanan	450.000.000,00
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah					
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	47.288.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Dokumen	150.000.000,00
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37100 Dokumen	425.110.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		37600 Dokumen	310.000.000,00
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1600 Dokumen	111.075.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1730 Dokumen	475.000.000,00
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285 Dokumen	165.045.100,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		305 Dokumen	138.000.000,00
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	47.288.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	45.000.000,00
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					
		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	22.228.240,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	34.560.000,00
						J U M L A H	16.427.584.992,00			16.968.524.760,00

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dibuat untuk periode 1 (satu) tahun, disusun sebagai indikator dalam menentukan arah kebijakan tahunan kinerja program dan kegiatan yang bersifat mendesak dan penting untuk dilaksanakan serta realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Diharapkan Rencana Kerja (RENJA–PD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat teratasi.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan time Schedul dalam pelaksanaan kegiatan/Sub Kegiatan belum tersusun secara matang sehingga capaian Realisasi Kinerja, fisik maupun keuangan seringkali lambat, dan selalu memanfaatkan waktu-waktu akhir tahun.
2. Penempatan rekening belanja yang kurang tepat, sehingga sering kali menjadi hambatan pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu adanya perubahan anggaran.

Kaedah-kaedah yang menjadi acuan dalam penyusunan renja-PD Badan Pendapatan Daerah adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis (renstra) perangkat daerah, dan rencana kerja (renja) perangkat daerah. Disamping itu penyusunan Renja juga memperhatikan hasil Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, serta adanya keselarasan dengan hasil Musrenbang Tingkat Propinsi.

Tahapan selanjutnya terhadap Renja yang telah disusun adalah dilakukan evaluasi pelaksanaan. Evaluasi dimaksud mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta pagu indikatif.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil agar Renja bapenda ini dapat terlaksana secara baik dan target kinerja dapat tercapai secara maksimal antara lain adalah :

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja secara matang dengan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.
2. Penyusunan Time schedul dan pelaksanaan secara tepat waktu.
3. Identifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan secara dini, agar dapat melakukan antisipasi lebih awal dan memperkecil resiko kegagalan mencapai target kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat khususnya wajib pajak daerah, sehingga program dan kegiatan dapat memberikan hasil (*Outcome*) yakni meningkatnya pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah yang akan berdampak pada meningkatnya anggaran pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor di Kabupaten Indragiri Hilir.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini dipakai sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Tembilahan, Juli 2024

KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



FADILLAH, S.Pi. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19691103 199803 1 005